

KEJAYAAN KELAPA SAWIT DALAM ANALISIS VERBAL

The Greatness of Oil Palm in Verbal Analysis

Heru Salam

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

ABSTRACT

Prospect of investment in the forestry sector is still enough attractive for employers. The problem encountered when investors use the forests for development oil palm plantation without regard to the functions of forests. These conditions will damage wildlife habitat of important flora, and also adverse various aspects of human life. To reduce the rate of forest damage, the government has issued Presidential Instruction No. 10/2011 which contain of moratorium on forest use. This policy will reduce GDP, but economic values of wildlife and important flora as well as environmental, can be improved.

Key Words : fungtion of forest, oil palm plantation, economic value

PENDAHULUAN

Beberapa informasi menjelaskan bahwa perluasan perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet yang menggunakan kawasan hutan, pada awalnya banyak menggunakan hutan lindung, dan hutan produksi. Kegiatan itu memicu protes berbagai pihak terutama lembaga-lembaga yang bergerak dalam lingkungan karena konversi peruntukan telah mengubah ekosistem hutan tetapi beberapa pihak menolak pendapat tersebut dengan berbagai pertimbangan: a). Kawasan yang dikonversi hanya sebagian kecil dari hutan seluas ratusan juta hektar sehingga dinilai tidak cukup berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. b). Nilai ekonomi hasil perkebunan lebih besar daripada hasil hutan dalam satuan yang sama (1 Ha), sehingga dapat mendukung upaya peningkatan PAD bagi daerah otonom. c). Pendapat tersebut banyak bermuatan nilai-nilai politis dalam dunia perdagangan terutama dari negara-negara pesaing produsen minyak nabati non sawit, sehingga tidak perlu direspon berlebihan.

Yang tidak banyak dipahami oleh investor perkebunan adalah sekecil apapun konversi itu, ketika bersentuhan dengan ekosistem, dampaknya tetap cukup besar karena memiliki sifat *dampak berantai* sehingga kerusakannya akan mengalir ke berbagai sektor diantaranya adalah pertanian. Karena berdampak ekosistem, apapun pendapatnya, apakah berkaitan dengan PAD, ataukah muatan politis, maka protes para aktivis lingkungan, seharusnya direspon positif sebelum musibah besar terjadi. Contoh yang patut diperhatikan adalah ancaman terhadap Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) yang memiliki keunikan

ekosistem sehingga dunia melindunginya dengan **Konvensi Ramsar**. Pengakuan dunia inilah yang harus diperhatikan oleh siapapun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

ANALISIS

a. Kontroversi Perluasan Kelapa Sawit di Hutan

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup pesat. Bahkan pada tahun 2009 cita-cita menjadi negara terkemuka dalam supply CPO berhasil menggeser posisi Malaysia sebagai *market leader* dunia. Bagi Indonesia, bermain dengan CPO sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 1967, Indonesia memiliki perkebunan besar seluas 105.808 ha, terdiri dari kebun kelapa sawit milik Perkebunan besar Negara seluas 65.573 ha dan perkebunan besar swasta 40.235 ha. Dari jumlah kebun seluas itu, mampu menghasilkan CPO 167.699 ton. Dalam waktu 12 tahun kemudian (1979) kebun sawit rakyat telah mencapai 3.125 ha. Dan sampai dengan tahun 2009, tercatat perkembangan luar biasa pada kebun rakyat dan kebun swasta masing-masing mencapai 3.300.481 ha dan 3.064.840 ha, sementara perkebunan besar negara hanya 760.010 ha. Dengan perkembangan tersebut tentu saja produksi CPO dari ketiga perkebunan (seluas 7.125.331 ha) juga meningkat sampai 16.091.500 ton. Rincian lengkapnya dapat disimak pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan luas perkebunan kelapa sawit sepuluh tahunan terakhir

Tahun	Luas areal (ha)			Luas total	Produksi CPO (ton)
	PR	PBN	PBS		
1967	0	65.573	40.235	105.808	167.669
1977	0	148.775	71.626	220.401	431.006
1987	203.047	365.575	160.040	728.662	1.506.055
1997	813.175	517.064	1.592.057	2.922.296	5.448.508
2007	2.857.777	717.803	2.849.481	6.425.061	14.151.983
2009	3.300.481	760.010	3.064.840	7.125.331	16.091.500

Sumber: Ditjenbun (diolah)

Perkiraan apa yang dapat ditangkap dari sajian informasi pada Tabel 1 tersebut? 1). Laju pertumbuhan luas perkebunan rakyat (PR) dan perkebunan besar swasta (PBS) jauh melampaui perkebunan besar Negara (PBN). 2). Dapat dipastikan, kebutuhan lahan untuk perluasan jutaan ha perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta (bandingkan dengan pertumbuhan perkebunan besar negara) dicukupi oleh sektor kehutanan. Dasar analisis untuk menjelaskannya tidaklah sulit karena tidak mungkin perkebunan rakyat mampu tumbuh secepat itu dalam waktu 22 tahun sementara dalam waktu bersamaan, pertumbuhan penduduk-pun juga cukup pesat sehingga luas lahan milik semakin berkurang. Hal yang sama

dapat dijelaskan pula pada perkebunan besar swasta. Apalagi dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2010-2019, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan SK pelepasan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 4,7 juta ha dan cadangan (untuk dilepaskan?) seluas 4,0 juta ha.

Pada satu sisi, angka-angka tersebut cukup melegakan karena kelapa sawit saat ini masih diakui mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa negara. Tetapi di sisi lain muncul kecemasan, ketika perluasan perkebunan kelapa sawit (di Sumatera) ternyata diawali dengan memanfaatkan sebagian dari kawasan hutan lindung dan produksi, (diskusi penulis dengan beberapa direktur perkebunan sawit). Lebih mencemaskan lagi ketika *greenpeace* menyampaikan keseluruhan penjurusan dunia hasil pengamatan penggunaan lahan gambut dan beberapa kawasan hutan produksi/kawasan lindung untuk perluasan kebun sawit, sehingga menghasilkan protes beberapa LSM lingkungan untuk memboikot CPO dari Indonesia. Termasuk pula protes terhadap penggunaan lahan/kawasan yang sama, untuk pengembangan HTI. Beberapa hasil kutipan pengamatan *greenpeace* disampaikan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pembakaran hutan untuk perluasan kebun sawit di Sumatera



Gambar 2. Kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan di Papua

Di Kalimantan Barat, Menteri Kehutanan mendesak Bupati Kapuas Hulu segera mencabut 12 unit izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di kawasan hutan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) karena melanggar ketentuan UU No 26 Tahun 2007 tentang tata ruang nasional. Beberapa perusahaan berijin, tersebar pada beberapa wilayah di kawasan TNDS yang telah ditetapkan sepihak oleh daerah otonom sebagai calon areal perluasan perkebunan seluas 143.250 ha. Informasi lengkapnya dapat diperhatikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa Wilayah Perluasan Kebun Sawit dalam Kawasan TNDS

No	Kecamatan/ Lokasi	Luas (ha)
1	Seberuang dan Silat Hilir	15.000
2	Badau	16.000
3	Semitau	15.250
4	Batang Lupar	17.000
5	Semitau,Suhaid	20.000
6	Silat Hilir	20.000
7	Silat hilir dan hulu	20.000
8	Badau dan Empanang	20.000
Jumlah luas areal		143.250

TNDS memang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/Kpts-II/1999, tanggal 4 Februari 1999. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan deforestasi tetap berlangsung sehingga mengancam keanekaragaman hayati Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) yang dikenal selain sebagai sumber utama pasokan air Sungai Kapuas, juga memiliki kekayaan alam sangat menakjubkan. Lahan hutan gambutnya ter-unik di dunia, dihuni lebih dari 80 jenis mamalia, 26 jenis reptilia, 270 jenis burung (aves) dan 260 jenis ikan. Di antaranya endemic (di dunia hanya ada di TNDS), seperti bekantan (*Nasalis larvatus*), kepuh (*Presbytis melolopus*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), buaya senyulong (*Tomistoma schegelii*) dan buaya katak/rabin (*Crocodylus raninus*), bangau tongtong (*Leptotilus javanicus*), bangau rawa (*Ciconia stromi*) dan rangkong/enggang serta raja udang. Keunikan itulah yang menarik perhatian dunia sehingga dunia melindunginya dengan **konvensi Ramsar**.

Sawit Watch menyebutkan pulau Sumatera yang menjadi habitat bagi spesies penting dan langka seperti harimau, badak, orang utan dan gajah telah kehilangan separuh tutupan hutannya (*forest cover*) dalam dua puluh tahun terakhir. Semenanjung Kampar selama berpuluh-puluh tahun mengalami tekanan akibat konversi hutan dan gambut oleh perkebunan kelapa sawit dan industry kertas, dan HPH besar, sehingga ketenaran dan keunikan ekosistem gambutnya terancam. Di sisi lain, menurut Sawit Watch, penggundulan hutan di Indonesia juga menyebabkan konflik diantara perusahaan dengan masyarakat adat di sekitarnya.

b. Kejayaan Kelapa Sawit

Popularitas sawit mencapai puncaknya ketika kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat tajam. Tercatat, selama 5 tahun terakhir rata rata pertumbuhan produksi minyak sawit dunia mencapai 8%. Sementara itu, pertumbuhan permintaannya mencapai 8,6 %

sehingga cukup menarik perhatian para pengusaha untuk menanam investasi di perkebunan sawit. Detilnya dapat diperhatikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor CPO dan Kernel Sawit (KPO)

Tahun	Ekspor <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)		Ekspor <i>Kernel Palm Oil</i> (KPO)	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
1969	179.113	23.978	0	0
1973	262.681	70.159	0	0
1978	412.153	208.805	0	0
1983	345.777	111.462	0	0
1988	852.843	333.868	111.375	40.625
1993	1.632.012	582.629	275.225	110.188
1998	1.479.278	745.277	347.009	195.447
2003	6.386.409	2.454.626	659.894	264.678
2005	10.375.792	3.756.557	1.042.613	602.606
Jumlah nilai ekspor tahun 2005				4.359.163

Sumber: Ditjenbun (diolah)

Informasi dari Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari ekspor CPO dan KPO selama tahun 1969 s/d 2005 naik cukup *significant*. Pada tahun 2005 jumlah penerimaan negara mencapai US\$ 4.359.163. Masalahnya, apakah setelah tahun 2005 trend pertumbuhannya semakin meningkat? Banyak faktor yang mesti harus dibahas.

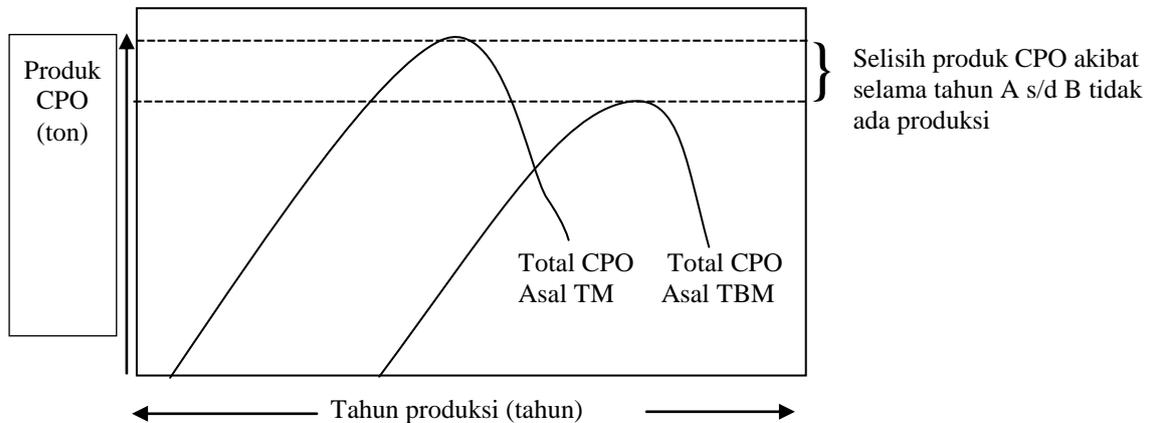
- a. Umur produktif tanaman kelapa sawit (hanya 25-30 tahun)
- b. Jumlah luas tanaman menghasilkan (TM, 65% dari luas 9,5 juta ha dan sisanya (35%) tanaman belum menghasilkan (TBM)
- c. Tahun awal perluasan kebun (1997) ternyata menggunakan kawasan hutan produksi dan lindung
- d. Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan hutan untuk perkebunan

Ternyata, apabila data/informasi tersebut dianalisis, dapat diperkirakan kejayaan kelapa sawit mulai turun pada tahun 2022 atau 11 tahun kedepan karena beberapa hal:

- a. Pada saat tanaman kelapa sawit mencapai umur 25-30 th, *replanting* harus segera dilakukan. Masalahnya, *replanting* kelapa sawit di areal bekas hutan sulit berhasil

sebaik tanaman awal, bahkan tanaman baru sering mati (komunikasi penulis dengan pelaku perkebunan di Jambi dan Bengkulu).

- b. Dengan asumsi kesulitan *replanting* terjadi pada semua tanaman sawit di hutan, dapat dipastikan hampir 65% tanaman menghasilkan(TM) dari total luas 9,5 juta ha hanya akan digantikan perannya oleh 35% luas tanaman muda (TBM). Berarti Indonesia akan kehilangan CPO cukup besar karena 30% areal sisanya tidak produksi dalam waktu cukup lama.
- c. Terbitnya Inpres No.10/2011 tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca pada th 2020 sebesar 26%, akan berdampak pada tertundanya perluasan perkebunan kelapa sawit pada lahan baru, diantaranya untuk keperluan peremajaan kebun lama pengganti *replanting* yang sulit dijamin keberhasilannya.
- d. Produksi akan tertunda karena tertundanya peremajaan/*replanting*, kecuali kalau dilakukan pada areal baru. Akan tetapi, hal tersebut juga sulit dilakukan karena adanya moratorium melalui Inpres No 10/2011 yang berlaku beberapa tahun ke depan.



Gambar 3. Kemunduran Produksi CPO Akibat Kesulitan *Replanting* dan Adanya Moratorium

c. Beberapa Implikasi

Kemunduran produksi CPO secara financial memang merugikan baik dari aspek investasi maupun devisa Negara sebesar 10 miliar dolar AS (Republika 30 Mei 2011). Tetapi tertundanya atau mungkin tidak diperbolehkannya penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan akan mendorong perbaikan pada ekosistem hutan sehingga habitat bagi flora dan fauna penting, akan berkembang. Perlu diketahui bersama oleh semua pihak yang masih

memiliki kepedulian terhadap lingkungan, nilai hasil hutan bukan kayu Indonesia cukup besar. Pada Tabel 4 gambarannya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Ekspor Hasil Hutan Bukan Kayu Selama Tahun 2002-2007 (US\$)

Tahun	Fauna (US\$)	Flora(US\$)	Total (US\$)
2002	1.676.683	446.881	2.123.563
2003	2.901.620	438.541	3.340.171
2004	12.900.398	2.259.423	15.159.821
2005	15.287.331	1.450.826	16.738.157
2006	4.441.536	1.100.040	5.541.577
2007	184.381.326	2.056.131	186.437.457

Sumber: RKTN Kementerian Kehutanan (2008)

Tampilan nilai-nilai tersebut belum memperhitungkan nilai-nilai lingkungan yang tidak dapat dihitung. Apalagi kalau harus memperhitungkan manfaat jasa lingkungan jangka panjang. Barangkali nilainya akan tidak terhingga.

Patut diwaspadai adanya informasi dari Malaysia yang menyebutkan bahwa beberapa pengusaha sawit di negara jiran mulai mengalihkan perkebunan kelapa sawit menjadi perkebunan kayu. Informasi tersebut harus direspon hati-hati karena dapat dinilai, memang sebagai “**kejadian sebenarnya**” atau hanya sebagai “**strategi**” Malaysia untuk mengacaukan pengembangan kelapa sawit Indonesia. Sementara pada sisi lain Malaysia masih merupakan investor perkebunan sawit terbesar dari sederetan investor PMA di Indonesia.

PENUTUP

Tulisan ini merupakan ulasan yang disusun dari data yang dikutip dari beberapa sumber, baik berupa internet maupun sebuah laporan, harian surat kabar, serta komunikasi langsung dengan pelaku bisnis kelapa sawit. Ulasan ini sengaja ditampilkan selain sebagai tulisan untuk mengisi terbitan perdana jurnal “Wana Tropika”, juga memberikan informasi seimbang kepada khalayak masyarakat dengan harapan masyarakat benar-benar memahami resiko pembukaan hutan untuk dikonversi dalam peruntukan lain terutama kawasan hutan yang termasuk dalam lingkaran hutan hujan tropika basah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehutanan.2008. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)2010-1029. Jakarta , Desember 2008

Purwaningsih, A. 2008.Berlomba-Lomba Merusak Hutan Papua.
<http://www.dw-world.de/popups/popup-lupe/0.377931.html>Diakses tgl 20 Mei 2011.